

PENGARUH INDUSTRI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

Wiwid Dyah Eva Iswanti^{1*}, Loggar Bhilawa²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

wiwiddyah.22042@mhs.unesa.ac.id¹, loggarbhilawa@unesa.ac.id²

Received: 10-05-2026

Revised: 18-06-2026

Approved: 26-06-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kontribusi sektor industri dan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel terhadap 190 observasi yang mencakup 38 kabupaten/kota selama lima tahun menggunakan teknik sampling jenuh. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan Hausman yang menetapkan Two-Way Fixed Effects Model sebagai model terbaik, sedangkan estimasi dilakukan menggunakan robust standard error metode White period (cross-section cluster) untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, kontribusi sektor industri dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 89,40%. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas sektor industri belum mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila manfaat fiskalnya tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan optimalisasi penerimaan pajak daerah berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Kontribusi Sektor Industri, Pajak Daerah, Regresi Data Panel

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dengan sektor industri sebagai penyumbang terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2025). Hal ini juga diikuti oleh peningkatan realisasi pajak daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025). Namun, kondisi tersebut belum diiringi dengan meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Menurut Sanur (2025), dalam Laporan Komisi II DPR RI, hanya 26 daerah atau sekitar 4,76% yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sedangkan 493 daerah atau sekitar 92,9% masih berada pada kategori kapasitas fiskal lemah. Kondisi ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dana transfer pemerintah pusat berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sehingga sebagian besar daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Mobilisasi pendapatan daerah melalui sumber-sumber internal menjadi salah satu indikator penting kapasitas fiskal pemerintah daerah karena menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan (Mahama et al., 2024). Secara ideal, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sektor industri dan pajak daerah merupakan sumber strategis karena berkontribusi terhadap pembentukan PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal (Musviyanti et al., 2022). Namun, kondisi empiris menunjukkan

adanya ketidaksesuaian antara potensi ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas basis pendapatan dan mengoptimalkan peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi daerah sebagaimana dikemukakan oleh Wiryawan & Otchia (2022) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan potensi ekonomi belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.

Secara nasional, nilai tambah sektor industri meningkat dari Rp3.068 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4.203 triliun pada tahun 2024 (Data Badan Pusat Statistik, 2025). sementara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melaporkan realisasi pajak daerah meningkat sekitar 52%. Fenomena serupa terjadi di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu kontributor utama perekonomian nasional (Ayuningtyas et al., 2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025), menunjukkan bahwa nilai tambah sektor industri meningkat dari Rp705,26 triliun menjadi Rp977,56 triliun pada periode 2020–2024. Selain itu, penerimaan pajak daerah juga meningkat sekitar 39,90% menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Meskipun demikian, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih sebesar 28,23% (Pramesti & Titik 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas industri dan penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga Provinsi Jawa Timur menjadi konteks yang relevan untuk penelitian ini.

Secara teoritis, hubungan antara kontribusi sektor industri, pajak daerah, dan kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan melalui Teori Keuangan Daerah dan Teori Desentralisasi Fiskal. Teori Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pendapatan menentukan kapasitas fiskalnya (Halim & Iqbal, 2020). Sementara itu, Teori Desentralisasi Fiskal menekankan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah memungkinkan optimalisasi potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayah masing-masing (Oates, 2006). Dalam kerangka tersebut, sektor industri dapat memperluas basis penerimaan pemerintah melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kapasitas perpajakan dan penerimaan pajak (Saptono, 2021). Di sisi lain, pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menghimpun pendapatan dari sumber internal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri (Khasanah & Susilowati, 2025). Dengan demikian, kedua teori tersebut memberikan landasan bahwa optimalisasi sektor industri dan penerimaan pajak daerah secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian mengenai hubungan antara sektor industri, pajak daerah, dan kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hermawan et al. (2022), menemukan bahwa sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Andresti & Jaurino (2023), menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pada variabel pajak daerah, Dewantoro (2022) dan Sulistyawati et al. (2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Deswita (2024) memperoleh hasil yang berbeda. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sektor industri, pajak daerah, dan kemandirian keuangan daerah masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan sektor industri sebagai determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga bukti empiris mengenai pengaruh langsung kontribusi sektor industri terhadap kemandirian keuangan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap dengan menguji secara simultan pengaruh kontribusi sektor industri dan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat penerapan Teori Keuangan Daerah dan Teori Desentralisasi Fiskal melalui pengujian langsung pengaruh kontribusi sektor industri dan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga memperluas pemahaman mengenai determinan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya bukti empiris mengenai determinan kemandirian keuangan daerah serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian keuangan daerah, khususnya pada wilayah yang memiliki basis industri yang kuat (Marselina & Herianti, 2022). Hal ini juga mendukung perumusan kebijakan fiskal yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan struktur industri daerah (Syafistianto, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel untuk memahami pengaruh dari kontribusi sektor industri dan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Populasi yang menjadi fokus pada kajian ini mencakup seluruh bagian data ekonomi dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan sektor industri dan keuangan daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan menerapkan pendekatan sampling jenuh. Teknik ini dipilih karena penelitian ini menggunakan seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024. Menurut Sugiyono (2019) teknik sampling jenuh diterapkan ketika ukuran populasi relatif kecil atau seluruh komponen populasi dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 190 observasi.

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Jenis Variabel	Definisi Operasional	Indikator Operasional	Satuan
Kontribusi Sektor Industri	Variabel Independen (X)	Kontribusi sektor industri mencerminkan persentase nilai tambah sektor industri terhadap total PDRB (Pane et al., 2024)	Persentase nilai tambah sektor industri terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Persentase (%)
Pajak Daerah	Variabel Independen (X)	Pajak daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang menjadi sumber penting pembiayaan penyelenggaraan	Logaritma natural (Ln) atas realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten/kota.	Ln (Rp)

		pemerintahan daerah. (Hutagulung, 2020)		
Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Dependen (Y)	Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan daerah secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada pemerintah pusat. (Shoba & Fidiana, 2022).	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Transfer yang dihitung dengan rumus:	Presentase (%)
		$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$		

Variabel pajak daerah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) untuk mengurangi perbedaan skala data, menstabilkan varians, serta mengurangi *skewness*, sehingga estimasi model regresi menjadi lebih stabil dan mudah diinterpretasikan (Gujarati & Porter, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi sesuai dengan karakteristik masing-masing variabel penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Sumber Data Penelitian

Variabel	Data yang Digunakan	Sumber Data
Kontribusi Sektor Industri	Nilai tambah sektor industri dan total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Pajak Daerah	Realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Kemandirian Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang paling sesuai, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM) (Basuki, 2023). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, *cross-sectional dependence*, dan autokorelasi. Apabila dalam proses pengujian ditemukan observasi yang teridentifikasi sebagai outlier, penelitian ini menerapkan metode Impulse Indicator Saturation (IIS). Metode IIS bekerja dengan menambahkan indikator impuls pada setiap observasi untuk mengidentifikasi observasi yang menyimpang secara sistematis (Hao, 2026).

Observasi yang teridentifikasi sebagai outlier kemudian dievaluasi, dan apabila terbukti memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap hasil estimasi, observasi tersebut ditangani melalui proses trimming sebelum dilakukan estimasi akhir model

regresi. Langkah ini dilakukan agar estimasi parameter lebih robust dan tidak dipengaruhi oleh observasi ekstrem. Untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi klasik, penelitian ini juga menerapkan pendekatan *robust standard error* sehingga estimasi *standard error* yang dihasilkan tetap konsisten dan pengujian statistik tetap valid meskipun terdapat pelanggaran terhadap beberapa asumsi model (Mansournia et al., 2021). Tahap akhir analisis dilakukan melalui pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Analisis Statistik Deskriptif

	KKD	KSI	Ln(PD)
Mean	0.282940	0.212966	25.60339
Median	0.216485	0.165675	25.44939
Maximum	1.573820	0.821330	29.19633
Minimum	0.086150	0.024470	24.03678
Std. Dev.	0.239191	0.171000	1.065478
Skewness	3.906221	1.729178	1.067179
Kurtosis	20.02260	5.740051	4.163491
Observations	190	190	190

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 3, penelitian ini menggunakan 190 observasi yang mencakup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,282940, dengan nilai minimum 0,086150 dan maksimum 1,573820, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah secara umum masih rendah dan mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Darmadi, 2021). Nilai tertinggi terdapat pada Kota Surabaya tahun 2020 yang didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi dan kontribusi sektor perdagangan, jasa, serta pariwisata terhadap PAD (Putri & Putri, 2024). Sebaliknya, nilai terendah terdapat pada Kabupaten Sampang tahun 2021 akibat rendahnya PAD dan dampak pandemi COVID-19.

Variabel Kontribusi Sektor Industri (KSI) memiliki rata-rata sebesar 0,212966 dengan nilai tertinggi pada Kota Kediri tahun 2020 yang didominasi sektor industri pengolahan, terutama PT Gudang Garam (Anggela et al., 2025). Sementara itu, nilai terendah pada Kabupaten Bangkalan tahun 2021 yang menunjukkan rendahnya peran sektor industri dalam pembentukan PDRB (Nurin & Putri, 2024). Variabel Pajak Daerah (PD) memiliki rata-rata sebesar 25,60339 dengan nilai tertinggi pada Kota Surabaya tahun 2024 dan terendah pada Kabupaten Sampang tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, di mana wilayah dengan aktivitas ekonomi dan basis pajak yang lebih kuat cenderung memiliki penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi (Amurwatpraja & Trisnaningsih, 2025).

Tabel 4.
Uji Pemilihan Model Regresi

Pengujian	Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	0,0000	FEM
Uji Hausman	0,0000	FEM

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel, Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 ($<0,05$) sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat dibandingkan Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, Uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($<0,05$), sehingga FEM lebih sesuai dibandingkan Random Effect Model (REM). Dengan demikian, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2.
Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Metode	Hasil Probabilitas	Keputusan
Normalitas (sebelum outlier)	Jarque-Bera	0,005360	Tidak berdistribusi normal
Normalitas (setelah outlier)	Jarque-Bera	0,305744	Berdistribusi normal
Multikolinearitas	Matriks Korelasi	0,557699	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Breusch-Pagan-Godfrey	KSI = 0,0002 PD = 0,0000	Terjadi heteroskedastisitas
Cross-Sectional Dependence	Pesaran CD	0,0058	Terdapat ketergantungan antar cross-section
Autokorelasi	Wooldridge Test	0,0007	Terdapat autokorelasi

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada tabel tersebut, uji normalitas sebelum penanganan *outlier* menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,005360 ($<0,05$), sehingga residual belum berdistribusi normal. Setelah dilakukan penanganan *outlier* menggunakan metode *Impulse Indicator Saturation* (IIS) melalui teknik *trimming*, nilai probabilitas Jarque-Bera meningkat menjadi 0,305744 ($>0,05$), yang menunjukkan bahwa residual telah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antarvariabel sebesar 0,557699 ($<0,80$), sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Namun, uji heteroskedastisitas, *cross-sectional dependence* (Pesaran CD = 0,0058), dan autokorelasi (Wooldridge Test = 0,0007) masing-masing menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,05, sehingga masih terdapat gejala heteroskedastisitas, *cross-sectional dependence*, dan autokorelasi dalam model. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model penelitian masih menghadapi

permasalahan heteroskedastisitas, cross-sectional dependence, dan autokorelasi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan estimasi menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan robust standard error untuk menghasilkan estimasi yang lebih andal meskipun terdapat pelanggaran asumsi klasik (Mansournia et al., 2021). Dengan demikian, model diestimasi menggunakan Two Way Fixed Effect Model yang dikombinasikan dengan robust standard error metode White period (cross-section cluster).

Tabel 6.
Hasil Analisis Robustness

Dependent Variable: KKD				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.326925	1.768425	-2.446768	0.0201
KSI	-0.164993	0.246950	-0.668126	0.5088
Ln(PD)	0.180764	0.070853	2.551248	0.0157
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.893996	Mean dependent var	0.261153	
Adjusted R-squared	0.862027	S.D. dependent var	0.206748	
S.E. of regression	0.076796	Akaike info criterion	-2.092263	
Sum squared resid	0.743102	Schwarz criterion	-1.358130	
Log likelihood	211.6117	Hannan-Quinn criter.	-1.794253	
F-statistic	27.96407	Durbin-Watson stat	1.410624	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil estimasi menggunakan Two Way Fixed Effect Model dengan White period (cross-section cluster) robust standard error pada tabel 6 menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penerapan robust standard error sekaligus merupakan analisis sensitivitas model yang bertujuan menghasilkan estimasi yang lebih andal dengan mempertimbangkan adanya heteroskedastisitas, cross-sectional dependence, dan autokorelasi. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian didasarkan pada model robust yang telah mengakomodasi pelanggaran asumsi klasik. Mengacu pada hasil estimasi regresi data panel diperoleh persamaan di bawah ini :

$$Y = -4.326925 - 0.164993KSI + 0.180764Ln(PD)$$

Nilai konstanta sebesar -4,326925 menunjukkan nilai dasar Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, meskipun secara ekonomi interpretasinya terbatas karena Kontribusi Sektor Industri (KSI) dan Pajak Daerah (PD) tidak mungkin bernilai nol. Koefisien KSI sebesar -0,164993 menunjukkan bahwa kenaikan kontribusi sektor industri sebesar 1% cenderung menurunkan KKD sebesar 0,164 poin dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor industri belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, koefisien PD sebesar 0,180764 menunjukkan bahwa kenaikan pajak daerah sebesar 1% akan meningkatkan KKD sebesar 0,18% dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.
Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.326925	1.768425	-2.446768	0.0201
KSI	-0.164993	0.246950	-0.668126	0.5088
Ln(PD)	0.180764	0.070853	2.551248	0.0157
F-Statistic	27,96407			0.0000
R-Squared	0,893996			

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 6, model penelitian memiliki nilai *F-statistic* sebesar 27,96407 dengan probabilitas 0,0000 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa Kontribusi Sektor Industri (KSI) dan Pajak Daerah (PD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Secara parsial, KSI tidak berpengaruh signifikan terhadap KKD (koefisien = -0,164993; $p = 0,5088$), sedangkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD (koefisien = 0,180764; $p = 0,0157$). Nilai R-squared sebesar 0,893996 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 89,40% variasi Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), sedangkan sekitar 10,60% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai koefisien determinasi yang relatif tinggi tersebut dapat dipengaruhi oleh penggunaan Two-Way Fixed Effects Model yang mampu mengakomodasi efek tetap antar kabupaten/kota (*cross-section fixed effects*) dan antarperiode (*time fixed effects*). Model ini mengendalikan heterogenitas yang tidak teramati pada masing-masing daerah maupun perubahan kondisi pada setiap periode, sehingga variasi Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) dapat dijelaskan secara lebih baik (Wooldridge, 2025). Dengan demikian, nilai R^2 yang tinggi dalam penelitian ini tidak semata-mata menunjukkan kemampuan variabel kontribusi sektor industri dan pajak daerah dalam menjelaskan KKD, tetapi juga mencerminkan kemampuan model dalam menangkap karakteristik spesifik daerah dan pengaruh waktu yang memengaruhi variasi kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh kontribusi sektor industri terhadap kemandirian keuangan daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah sektor industri belum mampu secara langsung memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dalam perspektif teori keuangan daerah, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari potensi yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan (Halim, 2007). Demikian pula dalam teori desentralisasi fiskal dijelaskan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi ekonomi secara lebih efektif (Oates, 1999). Secara teoritis, sektor industri berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

melalui perluasan basis pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta berbagai retribusi daerah. Selain itu, aktivitas industri juga menciptakan *multiplier effect* yang mendorong perkembangan sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan akomodasi sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Namun, potensi tersebut belum mampu dikonversi secara optimal menjadi PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar penerimaan yang dihasilkan dari aktivitas industri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan (Nursafitri & Priyono, 2025). Selain itu, aktivitas industri di Provinsi Jawa Timur juga terkonsentrasi pada beberapa wilayah, seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo (Ichsan, 2025). Keadaan tersebut menyebabkan manfaat ekonomi yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh kabupaten/kota. Akibatnya, besarnya aktivitas industri belum mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer karena sebagian besar manfaat fiskal dari aktivitas tersebut masih diterima oleh pemerintah pusat. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Andresti & Jaurino (2023) serta Athukorala & Patunru (2023) yang sama-sama menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa besarnya aktivitas industri tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan daerah apabila struktur penerimaan yang dihasilkan lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua penelitian tersebut tetap relevan karena PAD merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor industri belum menjadi determinan langsung kemandirian keuangan daerah. Kontribusi sektor industri terhadap kemandirian fiskal baru akan optimal apabila pemerintah daerah mampu mengonversi aktivitas ekonomi yang dihasilkan menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangannya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri, tetapi juga perlu memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan penerimaan yang menjadi kewenangan daerah. Secara praktis, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kawasan industri yang memiliki potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, memperbaiki basis data objek pajak yang berkaitan dengan aktivitas industri, meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, serta mendorong berkembangnya usaha pendukung seperti perdagangan, transportasi, pergudangan, dan jasa yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut memungkinkan pertumbuhan sektor industri tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memberikan manfaat fiskal yang lebih nyata bagi pemerintah daerah sehingga mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Optimalisasi penerimaan pajak daerah terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daerah menghimpun pajak, semakin besar pula kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini sejalan dengan teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan menghimpun dan mengelola sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Halim & Iqbal, 2020). Demikian pula, teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendapatan sesuai potensi daerah akan memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Oates, 2006). Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Dewantoro (2022) dan Sulistyawati et al. (2024) yang sama-sama menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu determinan utama kemandirian keuangan daerah. Kesamaan hasil tersebut didukung oleh karakteristik ketiga provinsi yang memiliki basis ekonomi kuat dan kawasan metropolitan, seperti Kawasan Metropolitan Rebana (Meliana et al., 2024). Selanjutnya, menurut Putra & Salim (2022), kawasan Gerbangkertosusila di Jawa Timur merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Sementara itu, menurut Viarum & Susilowati (2024), kawasan metropolitan Kedungsepur di Jawa Tengah berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Kepadatan aktivitas ekonomi di kawasan metropolitan tersebut berdampak pada meningkatnya objek dan subjek pajak daerah. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan pajak daerah menjadi lebih optimal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan realisasi pajak daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian semakin memperkuat temuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang secara langsung meningkatkan PAD sehingga kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Deswita (2024) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Payakumbuh. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, di mana Kota Payakumbuh memiliki basis ekonomi dan potensi pajak yang lebih terbatas, dengan struktur ekonomi yang didominasi industri kecil, agroindustri, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Lova et al., 2025). Dengan demikian, pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada kekuatan basis ekonomi masing-masing wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menjadikan optimalisasi pengelolaan pajak daerah sebagai salah satu prioritas dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui digitalisasi administrasi perpajakan, pembaruan basis data objek dan subjek pajak secara berkala, pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk meningkatkan akurasi pemungutan pajak, serta pengawasan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali secara optimal sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah sehingga strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran. Bagi daerah yang memiliki basis ekonomi relatif terbatas, peningkatan penerimaan pajak sebaiknya diiringi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial agar kapasitas fiskal dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa meningkatkan beban masyarakat secara berlebihan.

KESIMPULAN

Bahwa kontribusi sektor industri dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Namun, secara parsial kontribusi sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas industri belum secara langsung mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah karena sebagian besar manfaat penerimaan dari aktivitas industri masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya, pajak daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sehingga peningkatan penerimaan pajak daerah mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan serta memastikan aktivitas ekonomi, termasuk sektor industri, dapat memberikan kontribusi fiskal yang lebih besar bagi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amurwatpraja, M. S., & Trisnaningsih, S. (2025). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 43–55. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i2.6344>
- Andresti, O., & Jaurino. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 3(2), 8–14.
- Anggela, S. P., Riko, S. W., & Putra, P. (2025). Analisis Pengaruh Sektor Industri Terhadap Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kediri. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 16–33. <https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.2859>
- Athukorala, P.-C., & Patunru, A. A. (2023). Domestic Value Added, Exports and Employment: An Input–Output Analysis of Indonesian Manufacturing. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 365–390. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2134554>
- Ayuningtyas, F. J., Astuti, I. P., Imam, A. D., & Shi, K. (2023). East Java Province : Economic Structure and Forecast GRDP Analysis. *Journal of Economics and Development*, 13(2), 125–140. <https://doi.org/10.12928/optimum.v13i2.7958>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2020-2024*.
- Basuki, A. T. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*.
- Darmadi, D. (2021). *Administrasi Keuangan Daerah*. Empat Dua.
- Deswita, R. Y. (2024). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 715–727.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap

- Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*: Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Hao, O. (2026). *Essays on Outlier Robustness* [University of Oxford].
<https://doi.org/10.5287/ora-5rx46znge>
- Hermawan, H., Ramdhani, F., & Ramdhaniatulfitri, I. (2022). Peran Sektor Industri Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(3), 162–170.
<https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.40>
- Hutagulung, E. M. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Alqaprint Jatinangor.
- Ichsan, N. F. (2025). Peran Kawasan Industri Dalam Mendorong Ekonomi Daerah : Studi Kasus Jawa Timur. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 17(10), 3025–9495.
<https://doi.org/10.2324/802r2539>
- Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747–758.
<https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1338>
- Lova, A. T., P, A. G., Rachmi, A. F., Fadhlullah Ridwan, A., Syawaldo, F., Noviani, F., Annisa, K., Salsabila, L., Siregar, M. C. A., Ramadhan, N. G., Nadia, Putri, N. I., Saputri, Q. D., ANTika, R. L., Fajri, R. M., Jutri, S., & Putri, V. Y. (2025). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi: Perbandingan Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. *Jurnal Imiah Multidisiplin*, 1(2), 2300–2317.
- Mahama, P. Y., Abdulai, A. G., & Asamoah, K. (2024). Local revenue mobilisation in Ghana: Why similar metropolitan and municipal assemblies exhibit different outcomes. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100853.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100853>
- Mansournia, M. A., Nazemipour, M., Naimi, A. I., Collins, G. S., & Campbell, M. J. (2021). Reflections on Modern Methods: Demystifying Robust Standard Errors. *International Journal of Epidemiology*, 50(1), 346–351.
<https://doi.org/10.1093/ije/dyaa260>
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Meliana, C., Indriani, F., & Firdaus, Q. A. (2024). Kajian Sektor Ekonomi dan Strategi Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana. *Gorontalo Development Review (GOLDER)*, 7(2), 180–195. <https://doi.org/10.32662/golder.v0i0.3746>
- Musviyanti, Khairin, F. N., Bone, H., Syakura, M. A., & Yudaruddin, R. (2022). Structure of Local Government Budgets and Local Fiscal Autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 79–89.
[https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.07](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07)
- Nurin, S., & Putri, R. N. H. (2024). Potret Sektor Unggulan: Pemetaan Potensi Lokal Empat Kabupaten di Madura Melalui Tipologi Klassen Nurin. *Journal Of Economics*, 4(3), 105–125. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65971>
- Nursafitri, P. I., & Priyono, E. A. (2025). Struktur Pajak Pusat dan Daerah dalam Hukum :

- Analisis Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Ejournal Undip*, 18(4), 925–944.
<https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.71139>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47.
<https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. *Institutional Foundations of Public Finance*, 5, 165–189. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1nznfgfp.14>
- Pane, S. G., Alansyah, R., Rivaldi, R., Tasya, D. Z., Malau, E. V. A., & Nadya, S. (2024). Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Medan. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 4(1), 1651–1658.
- Postur APBD. (2025). Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Pramesti, I. O., & Titik, M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Accounting Global Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3318>
- Putra, R. D. W., & Salim, W. (2022). Struktur Ruang Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Teori Pusat-Pinggiran: Sebuah Kajian. *Jurnal Tata Loka*, 24(3), 186–201. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.186-201>
- Putri, F. W., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh PBJT Perhotelan , Tenaga Listrik dan Jasa Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2019-2024. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 765–775.
- Sanur, D. (2025). Membangun Kemandirian Desentralisasi Fiskal Daerah. *Info Singkat Komisi II, XVII*(17), 1–5.
- Saptono, P. B. (2021). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Southeast Asian Countries. *Journal of Developing Economies*, 6(2), 253–274.
<https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.29439>
- Shoba, A. N., & Fidiana. (2022). Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5), 107–122.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *CV Alfabeta*.
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian Empiris Faktor-Faktor Penentu Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Syafistianto, D. A. (2025). *Strategi Fiskal Indonesia 2025–2026: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global*. Kementerian Keuangan RI.
- Viarum, A., & Susilowati, D. (2024). Determinan Kemiskinan di Wilayah Metropolitan “Kedungsepur” Jawa Tengah. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 455–468.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v15i2.9213>
- Wiryanan, B. A., & Otchia, C. (2022). The legacy of the reformasi: the role of local government spending on industrial development in a decentralized Indonesia. *Journal of Economic Structures*, 11(3). <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00262-y>
- Wooldridge, J. M. (2025). Two-Way Fixed Effects, The Two-Way Mundlak Regression, and difference-in-differences estimators. *Empirical Economics*, 69(5), 2545–2587.
<https://doi.org/10.1007/s00181-025-02807-z>